

ABSTRAK

Permasalahan narkoba saat ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat mengkhawatirkan di dalam kehidupan masyarakat. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya mengakibatkan banyaknya korban penyalahguna narkoba, dan memperlihatkan bahwa pemerintah kurang serius dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan narkoba tersebut, pemerintah melakukan *Collaborative Governance* yang melibatkan aktor-aktor dari pemerintah dan non pemerintah. Kerjasama ini dilakukan oleh BNN Kota Pematangsiantar dengan Yayasan Rehabilitasi mercusuar Doa. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses dan hambatan yang terjadi dalam *Collaborative Governance* penanggulangan narkoba di Kota Pematangsiantar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan Pemanfaatan dokumen. Yang menjadi fokus penelitian pertama yaitu proses *Collaborative Governance* yang didalamnya terdapat indicator seperti dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi. Yang kedua yaitu hambatan dalam *Collaborative Governance* yang terdiri dari faktor regulasi, dan faktor anggaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governace* dalam penanggulangan narkoba di Kota Pematangsiantar dalam proses *Collaborative Governance* sudah berjalan dengan baik melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, walaupun belum efektif karena masih terdapat tindakan-tindakan yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian kersama, dan masih belum dapat menurunkan angka penyalahguna narkoba karena masih banyak jumlah korban penyalahguna narkoba setiap tahunnya di Kota Pematangsiantar. Sedangkan hambatan yang timbul dalam *Collaborative Governance* yaitu *Collaborative Governance* belum sepenuhnya efektif menyelesaikan masalah penyalahguna narkoba karena belum dipayungi regulasi yang spesifik serta kurangnya perhatian dan keseriusan pemerintah mengatasi permasalahan narkoba, dan keterbatasan anggaran untuk mengatasi pembiayaan permasalahan narkoba khususnya rehabilitasi penyalahguna narkoba di Kota Pematangsiantar.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Penanggulangan, Rehabilitasi, Narkoba

ABSTRACT

The drug problem is currently one of the most worrying problems in people's lives. The high number of drug abuse cases every year results in many victims of drug abusers, and shows that the government is not serious enough in dealing with this problem. One of the efforts made to overcome the drug problem, the government is implementing Collaborative Governance which involves government and non-government actors. This collaboration was carried out by the Pematangsiantar City BNN and the Doa Lighthouse Rehabilitation Foundation. This research aims to examine the processes and obstacles that occur in Collaborative Governance for dealing with drugs in Pematangsiantar City. The research method used in this research is a descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and use of documents. The focus of the first research is the Collaborative Governance process, which includes indicators such as collaboration dynamics, collaborative actions, as well as impacts and adaptations. The second is the obstacles in Collaborative Governance which consist of regulatory factors and budget factors. The results of this research show that Collaborative Governance in dealing with drugs in Pematangsiantar City in the Collaborative Governance process has been going well in carrying out rehabilitation for drug abusers, although it is not yet effective because there are still actions that do not work in accordance with the cooperation agreement, and are still unable to reduce the number drug abusers because there are still many victims of drug abusers every year in Pematangsiantar City. Meanwhile, the obstacles that arise in Collaborative Governance are that Collaborative Governance has not been fully effective in resolving the problem of drug abusers because it has not been covered by specific regulations, as well as the government's lack of attention and seriousness in dealing with drug problems, and budget limitations to overcome the financing of drug problems, especially the rehabilitation of drug abusers in Pematangsiantar City

Keywords: Collaborative Governance, Prevention, Rehabilitation, Drugs